



**RENCANA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN 2024**



BUPATI GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, maka perangkat daerah perlu menyusun rencana kerja perangkat daerah;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan tahunan perangkat daerah, rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai landasan penyusunan rencana kinerja dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan alat evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada setiap Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU  
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 29 Juli 2024



Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 29 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 30.

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	20
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	37
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja .....	41
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V : PENUTUP	56
5.1 Catatan Penting.....	56
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	56
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	56

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	: Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023.....	10
Tabel 2.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul .....	19
Tabel 2.3	: Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Gunungkidul.....	24
Tabel 2.4	: Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten.....	33
Tabel 3.1	: Prioritas dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja.....	41
Tabel 3.2	: Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja.....	42
Tabel 3.3	: Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja.....	42
Tabel 3.4	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja.....	43
Tabel 4.1	: Sasaran dan Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.....	44
Tabel 4.2	: Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 1 (satu) Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....	46
Tabel 4.3	: Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	48
Tabel 4.5	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Prakiraan Maju Tahun 2025	51

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN BUPATI  
GUNUNGGIDUL NOMOR 30  
TAHUN 2024 TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN 2025

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan adanya penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan yang baik oleh masing-masing Perangkat Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen perencanaan harus memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain untuk menjamin keberlanjutan pembangunan serta mempertahankan dan meningkatkan prestasi pembangunan yang telah dicapai di daerah. Karena itu, perencanaan tersebut harus disusun berpedoman pada RPJMD dan rencana strategis Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan, sehingga dapat dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja ini disusun berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2021-2024 serta arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026. Rancangan renja ini juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi *stakeholder* dan dinamika perkembangan politik dan pemerintahan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan RKPd 2025 yang bersifat indikatif. Selain itu Renja ini disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 serta

mengacu kepada RKPD Tahun 2025, yang memuat kebijakan, program dari Pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja juga mengacu pada Renja K/L dan Renja Provinsi dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Satuan Polisi Pamong Praja DIY dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Realisasi dari perencanaan dalam dokumen Renja Tahun 2025 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sehingga Renja PD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
- 14) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
- 15) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- 16) Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

#### A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran tentang prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu satu tahun ke depan, baik yang bersumber dari biaya APBN, APBD Propinsi DIY maupun APBD Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat yang dinamis.

#### B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah;
2. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA PD, RAPBD serta APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam waktu satu tahun;
4. Memudahkan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, koordinasi, monitoring, evaluasi serta pengendalian terhadap kegiatan semua personil dalam melaksanakan tugas;
5. Menjadi alat koordinasi dan kerangka acuan dalam rangka rencana pengembangan dan peningkatan kinerja dan profesionalitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
7. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;

8. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
9. Memberikan informasi kepada Dinas/ Instansi terkait, para pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATPOL PP

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

##### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

##### BAB V. PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II  
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten dan Renja PD Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.376.803.213,00.

Anggaran ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
    - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Pengadaan Mebel
    - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan Mebel
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h. Penataan Organisasi
  - 1) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
    - 1) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
    - 2) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
    - 3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
    - 4) Kerjasa antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - 5) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
    - 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
    - 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
    - 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
    - 1) Pembinaan Jagawarga

Evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2023 berdasarkan kinerja Renja PD Tahun 2023 sebagaimana laporan evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan e-Monev Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah sebagai berikut :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah;
    - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah sebagai berikut :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
    - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
      - e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
      - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah
      - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
      - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
    - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      - b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      - c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
      - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
      - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
      - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - a) Pengadaan Mebel
      - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - b) Pemeliharaan Mebel
    - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
      - a) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
      - b) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
      - c) Kerjasama antara Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      - d) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
      - a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
      - b) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
      - c) Penganganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
  - c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
    - 1) Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      - a) Pembinaan Jagawarga
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :
- 1) Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program dan kegiatan yaitu :
    - 1) Jumlah personil dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan.
  - 2) Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja keluaran program dan kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia.

4. Faktor-faktor penghambat yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
  - a. Banyaknya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memasuki masa purna tugas sehingga mengurangi personil Satuan Polisi Pamong Praja dan belum adanya pengadaan personil baik PNS maupun Tenaga Harian Lepas (THL).
5. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
  - a. Lebih cermat dalam melakukan perencanaan kinerja;
  - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan ikut serta pada kegiatan diklat dan bimtek.

Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan  
Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja s/d Tahun 2024  
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kabupaten/Kota									
1.05.1.05.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1.05.1.05.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		3 Dokumen;	3 Dokumen;	100%	2 Dokumen		
1.05.1.05.01.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
1.05.1.05.01.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		

1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01. 2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	8 Dokumen		2 Dokumen;	2 Dokumen;	100%	2 Dokumen		
1.05.1.05.01.01. 2.01.05	Perubahan Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	8 Dokumen		2 Dokumen;	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
1.05.1.05.01.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	100%	18 Dokumen		
1.05.1.05.01.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	75%	3 Laporan		
1.05.1.05.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1.05.1.05.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1960 Orang		490 Orang	490 Orang	100%	490 Orang		
1.05.1.05.01.01. 2.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		

1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01. 2.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laproan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52 Laporan		13 Dokumen;	13 Dokumen;	100%	13 Laporan		
1.05.1.05.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1.05.1.05.01.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	408 paket		101 stel	101 stel	100%	202 paket		
1.05.1.05.01.01. 2.05.03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen		
1.05.1.05.01.01. 2.05.09	Pendidikan danPelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang		2 Orang	0 Orang	0%	0 Orang		
1.05.1.05.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1.05.1.05.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket		
1.05.1.05.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket		6 paket	6 paket	100%	5 paket		

1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket		
1.05.1.05.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	26 paket		5 paket	5 paket	100%	11 paket		
1.05.1.05.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2920 dokumen		730 dokumen	730 dokumen	100%	730 dokumen		
1.05.1.05.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 laporan		10 Laporan	10 Laporan	100%	12 Laporan		
1.05.1.05.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 laporan		36 Laporan	36 Laporan	100%	22 Laporan		
1.05.1.05.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.05.1.05.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	97 Unit		71 Unit	71 Unit	100%	0 Unit		
1.05.1.05.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit		17 Unit	17 Unit	100%	0 Unit		
1.05.1.05.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			4 Unit	4 Unit	100%			
1.05.1.05.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.05.1.05.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan		

1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	100%	36 Laporan		
1.05.1.05.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1.05.1.05.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			258 Unit	258 Unit	100%	258 Unit		
1.05.1.05.01.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	210 Unit		42 Unit	42 Unit	100%	45 Unit		
1.05.1.05.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatah dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 Unit		24 Unit	24 Unit	100%	0 Unit		
1.05.1.05.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	5 Unit		
1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum									
1.05.1.05.01.02. 2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									

1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.02. 2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	10 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	100%	6 Dokumen		
1.05.1.05.01.02. 2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11.490 Orang		2148 Orang	2148 Orang	100%	1848 Orang		
1.05.1.05.01.02. 2.01.07	Kerjasama Antar Lembaga dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	80 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	100%	16 Dokumen		
1.05.1.05.01.02. 2.01.08	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	510 Stel		6102 Unit	6102 Unit	100%	0 Stel		
1.05.1.05.01.02. 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kanupaten/Koata Dan Peraturan Bupati/Wali Kota									
1.05.1.05.01.02. 2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupaati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha			13 Laporan	13 Laporan	100%	10 Laporan		

1	2	3	4	5	5	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.02. 2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	894 Laporan		148 Laporan	148 Laporan	100%	155 Laporan		
1.05.1.05.01.02. 2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	639 Laporan		75 Laporan	75 Laporan	100%	76 Laporan		
2.22.1.05.1.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan									
2.22.1.05.1.08.2 .09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya									
2.22.1.05.1.08.2 .09.17	Pembinaan Jaga Warga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	7.470 Orang		3950 Orang	3950 Orang	100%	4225 Orang		

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis PD, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja PD dan Rencana Strategis PD Satuan Polisi Pamong Praja.

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan pelayanan di SKPD yang dapat berdampak positif bagi masyarakat.

Pelayanan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu :

### I. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan ini dilaksanakan berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, yang bertujuan untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, tidak akan pernah lepas dari persoalan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang, dimana potensi permasalahan yang akan timbul adalah penyalahgunaan ruang publik, seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain. Ketenteraman merupakan kondisi aman dan nyaman masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan keindahan merupakan sinergi antara ketertiban dan ketenteraman, dimana wilayah Gunungkidul bisa menjadi daerah yang tertata dan terkelola dengan baik.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 juga membahas tentang mutu pelayanan dasar sub urusan Tramtibum, kriteria penerima jenis pelayanan dasar sub urusan Tramtibum dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar sub urusan Tramtibum. Oleh sebab itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Perda, harus bisa memberikan pelayanan dengan indikator TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten Gunungkidul.

Indikator ini dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$$

Sesuai dengan indikator diatas, maka kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan SPM dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, secara umum dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari total 312 kasus pelanggaran baik yang dilaporkan masyarakat maupun yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat terselesaikan 201 kasus, sehingga capaian kerjanya adalah :

$$\frac{201}{312} \times 100\% = \mathbf{64\%}$$

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 1 Januari sampai dengan akhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemantauan gangguan trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang publik lainnya;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang memadai;
3. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran K3;
4. Optimalisasi ketugasan PPNS melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan sebelum pelaksanaan tugas dilapangan;
5. Patroli / monitoring wilayah baik internal Satuan Polisi Pamong Praja maupun patroli terpadu dengan dinas/instansi terkait dan kecamatan, untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran perda yang terjadi; dan
6. Senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkesinambungan.

## II. Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026, maka indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mengacu tujuan dan sasaran utama RPJMD, adalah sebagai berikut :

1. Persentase penyelesaian pelanggaran K3
2. Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan
3. Nilai AKIP PD

Untuk lebih jelasnya, Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator (IKU , SPM, IKK)	Angka/ Nilai target/ standard (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	97,5 %	95,5 %	96 %	96,5 %	97 %	97,5 %	95,5 %	96 %	96,5 %	97 %	
2.	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	97,5 %	95,5 %	96 %	96,5 %	97 %	97,5 %	95,5 %	96 %	96,5 %	97 %	
3.	Nilai AKIP PD	84,56	80,56	81,56	82,56	83,56	84,56	80,56	81,56	82,56	83,56	

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tingkat kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja masuk kategori sangat baik, hal ini dibuktikan dengan realisasi pencapaian kinerja persasaran yang menunjukkan hasil positif. Persentase pelanggaran Peraturan Daerah yang terselesaikan dan persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan di daerah telah mencapai target yang ditetapkan.

Hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD antara lain :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan sesuai dengan tupoksinya;
2. Masih banyaknya tanah SG yang dipakai untuk mendirikan bangunan oleh masyarakat;
3. Wilayah bibir pantai yang masih digunakan oleh masyarakat untuk mendirikan gazebo;
4. Kurang maksimalnya penanganan laka laut karena kurangnya sarana dan prasarana;
5. Masih adanya PNS dan pelajar yang berkeliaraan pada jam kerja dan jam sekolah; dan
6. Masih beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa.

Isu-isu penting yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, yaitu :

#### A. Faktor Penghambat

- 1) Sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan ketugasan, baik sarana pokok maupun sarana penunjang masih belum memadai;
- 2) Banyak peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan situasi, kondisi dan dinamika masyarakat saat ini, sehingga perlu segera disesuaikan;
- 3) Masih banyaknya penyimpangan dan pelanggaran peraturan daerah;
- 4) Meningkatnya kriminalitas, penyakit masyarakat dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan peraturan daerah masih perlu ditingkatkan;
- 6) Masih banyak peraturan daerah yang belum ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati; dan
- 7) Minimnya informasi masyarakat terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### B. Faktor Pendorong

- 1) Adanya personil / aparat yang siap melaksanakan tugas;
- 2) Adanya anggaran dalam APBD untuk melaksanakan tugas dan fungsi;
- 3) Adanya regulasi dan payung hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- 4) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah;
- 5) Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif;
- 6) Adanya program-program terpadu secara lintas sektor;
- 7) Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional;

- 8) Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi; dan
- 9) Dukungan Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait.

#### C. Tantangan

- 1) Terjadinya globalisasi menyeluruh di semua sektor;
- 2) Terjadinya persaingan regional yang semakin ketat;
- 3) Terjadinya perubahan geo politik;
- 4) Kesiapan aparat penegakan hukum untuk melakukan reformasi;
- 5) Semakin tingginya biaya hidup dan menurunnya kemampuan sosial masyarakat;
- 6) Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat;
- 7) Menurunnya nilai-nilai moral dalam kehidupan dan masyarakat;
- 8) Semakin maraknya gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- 9) Menurunnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

#### D. Peluang

- 1) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah;
- 2) Terciptanya moralitas dan etika baru yang positif;
- 3) Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif;
- 4) Adanya program-program terpadu secara lintas sektor;
- 5) Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional;
- 6) Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi; dan
- 7) Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

#### E. Dampak

- 1) Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sehingga keamanan dan kenyamanan wisatawan dapat terwujud;
- 2) Menurunnya kasus pelanggaran perda; dan
- 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

Berdasarkan isu-isu penting di atas, maka dalam rangka mewujudkan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum serta penegakan peraturan daerah di Kabupaten Gunungkidul, Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk :

1. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban wilayah, melalui: penyelenggaraan operasi penertiban, pengawasan, dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum; serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan;
2. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan produk-produk hukum lainnya, sehingga terwujud masyarakat yang sadar hukum dan menurunnya pelanggaran. Hal ini dilakukan antara lain melalui :
  - a. tahap *Preemptif* (sosialisasi dan langkah-langkah persuasif kepada masyarakat dan instansi yang terkait agar peraturan daerah dipatuhi);

- b. tahap *Preventif* (pencegahan terjadinya pelanggaran peraturan daerah melalui teguran lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan daerah agar mematuhi peraturan daerah dan tidak melanggar lagi); dan
  - c. tahap *Represif* (penegakan dalam hal pelanggaran peraturan daerah sudah tidak bisa ditoleransi, misalnya sudah ditegur secara lisan maupun tertulis tetap ada pelanggaran peraturan daerah maka dilakukan tindakan penertiban baik secara yustisial maupun non yustisial, dimana dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dapat melibatkan aparat penegak hukum).
3. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan aktifitas pemerintahan, dengan melaksanakan pengawasan terhadap para Pejabat/tamu penting (VIP), penjagaan tempat-tempat vital/penting dan aset-aset daerah (rumah dinas pejabat dan gedung-gedung perkantoran) serta melaksanakan patroli (mengelilingi suatu wilayah tertentu yang bersifat rutin);
  4. Memelihara, mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ketugasan;
  5. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, wawasan, keterampilan dan profesionalisme dari sumber daya manusia yang ada.

#### 2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Peta jalan (*road map*) pembangunan jangka panjang baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota sudah disusun dalam dokumen perencanaan jangka panjang, dalam kerangka untuk memperjelas arah pembangunan dalam kurun waktu dua puluh tahun. Pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 juga telah dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta jalan (*road map*) yang merupakan implementasi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan nasional. Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu dokumen perencanaan di atasnya. Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024, juga dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rancangan Awal RKPD didasarkan pada analisis kebutuhan setiap PD. Namun demikian, pada tahap lebih lanjut dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap rancangan awal PD melalui forum PD/Forum Gabungan PD dan musrenbang kabupaten. Mendasar pada masukan-masukan dari berbagai pihak dan juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD. Dengan banyaknya kebutuhan akan anggaran biaya kegiatan, tidak seluruh rencana kegiatan dapat terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang

ada. Oleh karena itu dibuat urutan skala prioritas untuk menentukan urutan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap rancangan awal Rencana Kerja, hasil Forum Gabungan PD dan Musrenbang untuk usulan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dan perbedaan. Hal tersebut dikarenakan usulan disesuaikan dengan isu strategis yang terjadi. Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 secara lengkap tersaji dalam tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3  
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025  
Kabupaten Gunungkidul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	4.252.213.438	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	1.562.325.700	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	100 persen	35.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	100 persen	50.160.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	12.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	24.760.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	3.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 laporan	7.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 laporan	4.700.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	3 laporan	8.700.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	3 laporan	8.700.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan terfasilitasi	100 persen	3.366.580.250	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan terfasilitasi	100 persen	14.500.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	490 orang	3.254.580.250	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	490 orang	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	6.500.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan keuangan bulanan/ trwiualan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	13 laporan	105.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan keuangan bulanan/ trwiualan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	13 laporan	8.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan data dan informasi ASN terfasilitasi	100 persen	233.470.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan data dan informasi ASN terfasilitasi	100 persen	535.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	102 paket	185.220.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	102 paket	195.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 dokumen	11.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 dokumen	180.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	36.750.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 orang	160.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum terfasilitasi	100 persen	250.033.188	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum terfasilitasi	100 persen	585.950.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.750.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	6.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	25.250.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	229.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	3.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	3.500.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	24.983.188	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	43.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	730 dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	730 dokumen	4.800.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan dan tamu	12 laporan	22.050.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan dan tamu	12 laporan	22.050.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	22 laporan	165.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	22 laporan	277.600.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang terlaksana	100 persen	101.230.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang terlaksana	100 persen	30.500.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	86.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	14.480.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	30.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terfasilitasi	100 persen	265.400.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terfasilitasi	100 persen	346.215.700	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	271 unit	211.150.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	271 unit	321.565.700	
	Pemeliharaan Mebel	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah mebel yang dipelihara	42 unit	2.700.000	Pemeliharaan Mebel	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah mebel yang dipelihara	42 unit	2.700.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 unit	16.850.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 unit	16.850.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	34.700.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6 unit	5.100.000	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase ketentraman dan ketertiban umum terlaksana	97 Persen	2.976.143.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase ketentraman dan ketertiban umum terlaksana	97 Persen	1.555.374.700	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota terfasilitasi	97 Persen	2.727.493.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota terfasilitasi	97 Persen	1.178.732.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	2 dokumen	34.500.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	38 dokumen	310.605.000	PIS, PIWK
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2298 orang	2.356.993.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1368 orang	239.125.000	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1602 dokumen	260.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	13 dokumen	519.652.000	
	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	20 kasus	18.500.000	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	6 laporan	7.200.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah seragam SAR Linmas tersedia	102 stel	57.500.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah seragam SAR Linmas tersedia	102 unit	102.150.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Waikota terfasilitasi	97 Persen	248.650.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Waikota terfasilitasi	97 Persen	376.642.700	
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13 laporan	123.597.500	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	139 laporan	75.500.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	85 laporan	96.335.200	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota	193 laporan	173.150.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota	196 laporan	156.710.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase kelompok jagawarga yang terbina	83 persen	400.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase kelompok jagawarga yang terbina	83 persen	0	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Persentase kelompok jagawarga yang terbentuk	83 persen	400.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Persentase kelompok jagawarga yang terbentuk	83 persen	0	
	Pembinaan Jagawarga	Kab.Gunungki dul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang mengikuti pembinaan jagawarga yang dibina	1494 orang	400.000.000	Pembinaan Jagawarga	Kab.Gunungki dul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang mengikuti pembinaan jagawarga yang dibina	1494 orang	0	
TOTAL					7.628.356.438					3.117.700.400	

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat. Melalui Musrenbang kecamatan dan Forum Gabungan PD, usulan dari masyarakat ditelaah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain urgen tidaknya, dana yang tersedia dan kemanfaatannya. Namun demikian tidak seluruh aspirasi masyarakat yang ada dapat terserap dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2.4  
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Gombang, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
2	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kedungpoh, nglipar, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
3	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kantor Kalurahan Kelor Sudimoro, Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
4	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Balai Kalurahan Bendungan, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
5	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Karangtengah, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
6	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Jurangjero,Ngawen,Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
7	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Bedoyo Kidul RT001 RW006, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
8	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Balai Kalurahan Sambirejo, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
9	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Satlinmas Kalurahan Ngalang, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
10	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Doga Rt 09 Rw 002 Nglanggeran Patuk Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
11	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Giritirto, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
12	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Grogol, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
13	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kepuh, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
14	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
15	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Balai Kalurahan Terbah, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
16	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Giricahyo, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
17	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Tancep, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
18	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Komplek Balai Kalurahan Pengkol RT 001/ RW 006 Kebonjero, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
19	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Kalitekuk, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
20	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Jerukwudel, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
21	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Nglindur Girisubo Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
22	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kalurahan Kampung, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
23	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Beji, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
24	(PIS) - Pembinaan anggota Satlinmas	Kepuh Karangawen girisubo, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.450.000	7.450.000	
25	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Kantor Kalurahan Kelor Sudimoro, Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
26	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Bototengah RT 02 RW 04, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
27	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Kalurahan Tancep, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
28	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Kalurahan Karangduwet Jalan Raya Paliyan Km 15 Karangduwet Paliyan, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
29	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Kalurahan Gedangrejo Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
30	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
31	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Watusigar rt 01/rw 012, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	3 angkatan	7.170.000	21.510.000	
32	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Sodo, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
33	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Kalurahan Terbah, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
34	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Kalurahan Songbanyu Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
35	(PIS) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Serut Rt 01/01, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	2 angkatan	7.170.000	14.340.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
36	(PIS) - Penyuluhan dampak miras	Balai Kalurahan Sidorejo, Bolodukuh Lor RT 01 Rw 06, Sidorejo Ponjong, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
37	(PIS) - Penyuluhan dampak miras	Bedoyo Kidul RT001 RW006, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
38	(PIS) - Penyuluhan dampak miras	Kalurahan Hargomulyo, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	2 angkatan	7.170.000	14.340.000	
39	(PIS) - Penyuluhan dampak miras	Kalurahan Karangduwet Jalan Raya Paliyan Km 15 Karangduwet Paliyan, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
40	(PIS) - Penyuluhan dampak miras	Sodo, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
41	(PIS) - Penyuluhan dampak miras	Beji, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
42	(PIS) - Penyuluhan dampak miras	Kalurahan Tancep, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
43	(PIS) - Penyuluhan dampak miras	Kalurahan Ngestirejo, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
44	(PIS) - Penyuluhan dampak miras	Kalurahan Songbanyu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
45	(PIS) - Penyuluhan dampak miras	Kepuh Karangawen Girisubo gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
46	(PIS) - Penyuluhan dampak premanisme dan vandalisme	Kantor Kalurahan Kelor Sudimoro, Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
47	(PIS) - Penyuluhan dampak premanisme dan vandalisme	Balai Kalurahan Sidorejo, Bolodukuh Lor RT 01 Rw 06, Sidorejo Ponjong, Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sidorejo, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
48	(PIS) - Penyuluhan dampak premanisme dan vandalisme	Bedoyo Kidul RT001 RW006, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
49	(PIS) - Penyuluhan dampak premanisme dan vandalisme	Kalurahan Mulusan, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
50	(PIS) - Penyuluhan dampak premanisme dan vandalisme	Kalurahan Karangduwet Jalan Raya Paliyan Km 15 Karangduwet Paliyan, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
51	(PIS) - Penyuluhan dampak premanisme dan vandalisme	Doga Rt 09 Rw 002 Nglanggeran Patuk GK, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.170.000	7.170.000	
52	(PIS) - Penyuluhan Kenakalan Remaja	Kalurahan Sumberwungu , Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	9.965.000	9.965.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
53	(PIS) - Penyuluhan Kenakalan Remaja	Balai Kalurahan Sidorejo, Bolodukuh Lor RT 01 Rw 06, Sidorejo Ponjong, Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sidorejo, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	9.965.000	9.965.000	
54	(PIS) - Penyuluhan Kenakalan Remaja	Sendang 2, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	9.965.000	9.965.000	
55	(PIS) - Penyuluhan Kenakalan Remaja	Bedoyo Kidul RT001 RW006, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	9.965.000	9.965.000	
56	(PIS) - Penyuluhan Kenakalan Remaja	Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	9.965.000	9.965.000	
57	(PIS) - Penyuluhan Kenakalan Remaja	Kalurahan Semoyo, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	9.965.000	9.965.000	
58	(PIS) - Penyuluhan Kenakalan Remaja	Beji, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	9.965.000	9.965.000	
59	(PIWK) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Serut Rt 01/01, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.110.000	7.110.000	
60	(PIWK) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Ngleri, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.110.000	7.110.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
61	(PIWK) - Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.110.000	7.110.000	
62	(PIWK) - Penyuluhan dampak miras	Kalurahan Pucanganom, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.110.000	7.110.000	
63	(PIWK) - Penyuluhan dampak miras	Getas Rt 27/05, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.110.000	7.110.000	
64	(PIWK) - Penyuluhan dampak miras	Girijati, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.110.000	7.110.000	
65	(PIWK) - Penyuluhan dampak miras	Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.110.000	7.110.000	
66	(PIWK) - Penyuluhan dampak premanisme dan vandalisme	Wilayah Kalurahan Ngalang, Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.110.000	7.110.000	
TOTAL						527.705.000	

BAB III  
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 yaitu : *“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*. Sejalan dengan tema pembangunan nasional tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 menetapkan tema pembangunan sebagai berikut: *“Pemantapan Pembangunan Manusia Dengan Dukungan Layanan Publik Berkualitas Untuk Kesejahteraan Masyarakat”*.

Dengan berpedoman pada tema pembangunan nasional dan tema pembangunan DIY serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan sinergi pembangunan daerah, Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema pembangunan tahun 2025: *“Optimalisasi kondisi perekonomian daerah, taraf hidup masyarakat, infrastruktur dan peningkatan SDM”*.

Selanjutnya tema pembangunan tersebut, dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
2. Peningkatan Ekonomi:
  - a. UMKM Unggulan
  - b. Investasi dan Pariwisata
  - c. Pengembangan Sektor Unggulan
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peningkatan SDM;
5. Ketentraman dan Ketertiban;
6. Reformasi Birokrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Prioritas daerah, sasaran daerah dan sasaran PD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dapat kita lihat dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1  
Prioritas dan Sasaran  
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1.	Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	Indeks: 1. Persentase penyelesaian pelanggaran K3 2. Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan Nilai AKIP PD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dan hasil penjabaran visi Kabupaten Gunungkidul, maka *tujuan yang ingin dicapai* oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Terwujudnya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum.
2. Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian integral dari perencanaan strategis instansi pemerintah yang terfokus pada bagaimana mengalokasikan sumber daya dalam kegiatan operasional. Kriteria dalam penentuan sasaran antara lain: spesifik, menantang namun dapat dicapai, realistis sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki dan dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka *sasaran* Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, ditetapkan sebagai berikut :

1. Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat;
2. Pengembangan ragam budaya berbasis pemerintah masyarakat meningkat.

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layaranan ketentraman, ketertiban serta penegakan Perda dan Perkada;
2. Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD;
3. Meningkatkan kualitas dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan ragam budaya.
4. Pemberdayaan sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran secara optimal, untuk bersiap menghadapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat;

Tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2024 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya, dapat kita lihat dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2  
Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026 dalam Renstra Tahun 2021-2026	Proyeksi Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1.	Terwujudnya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hokum	Persentase peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hokum	96,7%	97,5%

Tabel 3.3  
Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD dalam RPJMD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2026
1.	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	96,7%	97,5%
		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	96,7%	97,5%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	82,56%	84,56

Untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong kabupaten Gunungkidul dirumuskan berdasarkan sasaran-sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Satuan Polisi Pamong Praja

No	I K U	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Penyelesaian Pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada Meningkat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	97%
		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada terselesaikan	97%

BAB IV  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah  
Berdasarkan visi dan misi Bupati, maka prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, dengan sasaran daerah yaitu ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat.
2. Kebijakan anggaran  
Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kabupaten sangat terbatas sehingga ditetapkan program dan kegiatan dengan prioritas anggaran diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah, maka ditetapkan pagu indikatif. Kebijakan atas pagu indikatif dilakukan melalui proses penganggaran, yaitu dengan memperkirakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah  
Berdasarkan prioritas pembangunan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka pada tahun anggaran 2025, Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Rencana anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut disusun berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta prakiraan maju pada tahun anggaran berkenaan.

Hasil perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 kami sajikan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1  
Sasaran dan Program / Kegiatan  
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran PD	Nama Program / Kegiatan
1	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	Program: Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan: 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota terfasilitasi Sub Kegiatan: a. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota. b. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat

		<p>termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.</li> <li>d. Pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum</li> </ol> <p>2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota</p> <p>Sub kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</li> <li>b. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota</li> <li>c. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota</li> </ol> <p>Program:  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Sub kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</li> <li>b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD</li> <li>c. Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> <li>d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD</li> <li>e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD</li> <li>f. Evaluasi kinerja perangkat daerah</li> </ol> </li> <li>2. Administrasi Keuangan Daerah  Sub kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</li> <li>b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</li> <li>c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD</li> </ol> </li> <li>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  Sub kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya</li> <li>b. Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian</li> <li>c. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</li> </ol> </li> <li>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah  Sub kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</li> <li>b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>c. Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor</li> <li>d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li> <li>e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>f. Fasilitasi kunjungan tamu</li> <li>g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</li> </ol> </li> <li>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Sub kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan</li> </ol> </li> </ol>
--	--	---

		listrik
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub kegiatan a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan b. Pemeliharaan mebel c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya d. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

a. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dari tabel 4.1 tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan 2 (dua) program yang terjabarkan dalam 8 (delapan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 (satu) program dengan 6 (enam) kegiatan difokuskan untuk penguatan kapasitas internal Perangkat Daerah dan 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan dilakukan untuk mendukung visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.

Untuk lebih jelasnya kami paparkan rekapitulasi program dan kegiatan utama Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 sebagaimana tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2  
Rekapitulasi Program dan Kegiatan  
Berdasarkan 2 (dua) Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program / Kegiatan	Pagu indikatif (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan : 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	1.178.732.000  376.642.700	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan : 1. Perencanaan,	50.160.000	

		Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.500.000	
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	535.000.000	
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	585.950.000	
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.500.000	
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.215.700	

b. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

Upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan diwujudkan dalam bentuk rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan prioritas juga disusun untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, seperti dapat kita lihat dalam tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3  
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah		Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD				
					Indikator	Target										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat meningkat	1.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban masyarakat	1.	Penyelesaian pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perkada meningkat	1.	1. Persentase penyelesaian pelanggaran K3	97 Persen	1.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten/ Kota	310.605.000	34.500.000	SAT POL PP	
												Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	239.125.000	2.356.993.000	SAT POL PP	
												Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	519.652.000	260.000.000		
												Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	7.200.000	18.500.000	SAT POL PP	
												Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	102.150.000	57.500.000	SAT POL PP	
							2. Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	123.597.500		SAT POL PP
												Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	96.335.200	75.500.000	SAT POL PP	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12				
												Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	156.170.000	173.150.000	SAT POL PP	
Total										1.555.374.700	2.976.143.000					

Secara keseluruhan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025 melaksanakan 2 program yang terbagi menjadi kegiatan dan sub kegiatan. Terdapat 1 (satu) program utama, 1 (satu) program yang merupakan program pendukung kinerja yang dilaksanakan di sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja. Program dan kegiatan ini sebagian besar telah sesuai dengan dengan rancangan awal RKPD. Sedangkan rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijabarkan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.117.700.400				7.288.356.438
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik		100 persen	1.562.325.700				4.252.213.438
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	Sat Pol PP	100 persen	50.160.000				31.372.000
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Sat Pol PP	3 dokumen	24.760.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 dokumen	12.500.000
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Sat Pol PP	1 dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 dokumen	1.000.000
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Sat Pol PP	1 dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 dokumen	1.000.000
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Sat Pol PP	2 dokumen	3.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 dokumen	3.000.000
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Sat Pol PP	2 dokumen	2.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 dokumen	2.000.000
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sat Pol PP	18 laporan	4.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		18 dokumen	7.700.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Sat Pol PP	3 laporan	8.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 laporan	8.700.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan terfasilitasi	Sat Pol PP	100 persen	14.500.000				3.366.580.250
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sat Pol PP	490 orang	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		490 orang	3.254.580.250
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Sat Pol PP	1 laporan	6.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 laporan	6.500.000
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Sat Pol PP	13 laporan	8.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		13 laporan	105.500.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan data dan informasi ASN terfasilitasi	Sat Pol PP	100 persen	535.000.000				233.470.000
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Sat Pol PP	102 paket	195.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		102 paket	185.220.000
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Sat Pol PP	4 dokumen	180.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 dokumen	11.500.000
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jawa Barat, Luar Wilayah	4 orang	160.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 orang	36.750.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum terfasilitasi		100 persen	585.950.000				250.033.188
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Sat Pol PP	1 paket	6.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 paket	5.750.000
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Sat Pol PP	5 paket	229.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 paket	25.250.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Sat Pol PP	1 paket	3.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 paket	3.500.000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Sat Pol PP	5 paket	43.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 paket	24.983.188
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Sat Pol PP	730 dokumen	4.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		730 dokumen	3.500.000
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan dan tamu	Sat Pol PP	12 laporan	22.050.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 laporan	22.050.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jateng, Jabar, Jatim, Jakarta, Luar Jawa	22 laporan	277.600.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		22 laporan	165.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasen penyediaan jasa penunjang terlaksana		100 persen	30.500.000				101.230.000
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Sat Pol PP	4 laporan	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 laporan	86.750.000
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Sat Pol PP	36 laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		36 laporan	14.480.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terfasilitasi		100 persen	346.215.700				265.400.000
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Sat Pol PP	271 unit	321.565.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		271 unit	211.150.000
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Sat Pol PP	42 unit	2.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		42 unit	2.700.000
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Sat Pol PP	23 unit	16.850.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		23 unit	16.850.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Sat Pol PP	12 unit	5.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 unit	34.700.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum terlaksana		97 Persen	1.555.374.700				2.976.143.000
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi		97 Persen	1.178.732.000				2.727.493.000
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	Wilayah Kab. GK	38 dokumen	310.605.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 dokumen	34.500.000
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Wilayah Kab. GK	1368 orang	239.125.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2298 orang	2.356.993.000
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Wilayah Kab. GK	13dokumen	519.652.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1602 dokumen	260.000.000
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Wilayah Kab. GK	6 laporan	7.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		20 kasus	18.500.000
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah seragam SAR Linmas tersedia	Wilayah Kab. GK	102 unit	102.150.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		102 stel	57.500.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota terfasilitasi		97 Persen	376.642.700				248.650.000
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota	Wilayah Kab. GK	13 laporan	123.597.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	Wilayah Kab. GK	85 laporan	96.335.200	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		145 laporan	75.500.000
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota	Wilayah Kab. GK	196 laporan	156.710.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		198 laporan	173.150.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase kelompok jagawarga yang terbina		83 persen	0				400.000.000
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kelompok jagawarga yang terbentuk		83 persen	0				400.000.000
	Pembinaan Jagawarga	Jumlah orang mengikuti pembinaan jagawarga yang dibina	Wilayah Kab. GK	1494 orang	0	Dana Keistimewaan		1494 orang	400.000.000

## BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan pembuatan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

### 5.1 Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

### 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

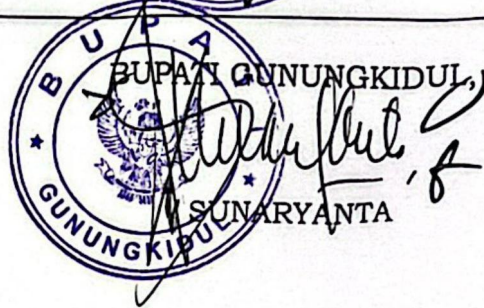
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman  
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

Wonosari, 20 Juni 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



EDY BASUKI



BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA